

Warga DKI dengan Mobilitas Rendah Jadi Sasaran Vaksinasi

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, masih ada sekitar 3 juta warga Jakarta yang belum mengikuti vaksinasi Covid-19. Anies menyebut, masyarakat tersebut umumnya memiliki mobilitas yang rendah.

"Yang mobilitasnya tinggi, yang kerja, rata-rata sudah divaksin semua. Tetapi mereka yang diam di rumah, tidak ada aktivitas, itu yang banyak belum divaksin. Jadi, kita akan menjangkau mereka," kata Anies.

Oleh karena itu, ia menuturkannya, Pemprov DKI pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjangkau warga ber-KTP Jakarta yang belum mengikuti vaksinasi Covid-19. Dia menuturkannya, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya, yakni menjangkau masyarakat di setiap

rumah dan permukiman dengan menggerakkan kader dasawisma PKK di masing-masing wilayah.

"Mereka membawahi 10 sampai 20 kepala keluarga, mereka mendatangi, mengajak untuk mengikuti vaksinasi. Itu strategi utamanya," jelas dia.

Selain itu, Anies mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak 9,3 juta orang di Ibu Kota yang menerima vaksinasi Covid-19 dari target 11 juta orang. Namun, jelas dia, dari 9,3 juta orang itu, 40 persen di antaranya merupakan warga dari luar Jakarta yang beraktivitas dan melakukan vaksinasi di Ibu Kota.

"Jadi, kita sekarang harus kerja ekstra untuk mengajak warga Jakarta yang berada di Jakarta, KTP Jakarta, tetapi belum vaksin," tuturnya. ● yan

Trotoar 2,4 Km Dibangun di Duri Kosambi, Rampung November 2021

JAKARTA (IM) - Trotoar jalan tengah dibangun di sepanjang kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. "Trotoar ini ada di kiri dan kanan jalan, melintang dari perlintasan rel kereta api dekat Stasiun Rawa Buaya sampai depan Kantor Kelurahan Duri Kosambi," kata Budi Cahyo, Kasie Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga DKI, Jumat (20/8).

Budi menjelaskan, panjang trotoar sekitar 2,4 kilometer dengan lebar rata-rata 1,7 meter. Pengerjaan trotoar sudah dimulai sejak 28 Juni 2021 dan ditargetkan rampung pada 24 November 2021, atau selama sekitar 150 hari.

"(Proyek) sempat agak lambat start-nya karena lokasi

sulit dan sempit, sekarang baru sekitar 10 persen," ungkap Budi.

Ia menambahkan, proyek tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan. Pasalnya, trotoar dibangun di jalanan yang relatif sempit.

"Memang cukup sempit dan lebar jalan existing (jalan yang sudah ada) itu sekitar 5,3 sampai 6 meter jadi kami membangun trotoar tidak mengurangi lebar jalan tapi memanfaatkan sisa tepi jalan yang ada, termasuk dengan menutup saluran," jelas Budi.

Sementara, banyak lokasi usaha yang menggunakan tepi jalanan sebagai lahan parkir. "Nah kalau sudah ada trotoar tidak ada lahan parkir lagi, padahal sudah sempit jalanan itu, jadi mungkin bisa macet," tutup Budi. ● yan

DINILAI LANGGAR PUTUSAN MA

Organda Minta Hentikan Pengecualian Angkutan Online di Ganjil Genap

JAKARTA (IM) - Organisasi Angkutan Daerah (Organda) DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat geram dengan adanya pengecualian angkutan online melintas kawasan ganjil genap yang berlaku di Jakarta. Pengecualian tersebut dinilai merugikan pemilik kendaraan.

Ketua Organda DKI Jakarta, yang juga sekaligus sebagai Korwil IIA yang membawahi 3 provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten, Shafruhan Sinungan mengatakan, pemasangan stiker yang dilakukan Badan Pengolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK) angkutan online jelas melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan

orang.

Di mana, kata Shafruhan, dalam pasal 27 yang mengatur pemasangan kode khusus atau pemasangan stiker di setiap taxi online sangat merugikan pemilik kendaraan. Bahwa, dalam pasal ini jika diterapkan sangat berbahaya.

Hal ini sama saja mengadu antara taxi online dan taxi konvensional. Dengan pemasangan stiker, orang-orang yang tidak suka keberadaan taxi online akan lebih mudah mengenalinya.

"Kami sangat keberatan dengan peluncuran pemasangan stiker ASK tersebut dikarenakan kondisi situasi transportasi umum sudah sangat terpuruk," kata Shafruhan saat dihubungi Jumat (20/8). ● yan

Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Terus Menurun

CIKARANG (IM) - Kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam sepekan terakhir terus menurun menurut Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

"Dalam satu pekan terakhir kasus aktif di kita terus turun, tetap jaga prokes agar jangan kembali naik," kata Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah di Cikarang, Jumat (20/9).

Ia memaparkan, kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi yang pada 14 Agustus 2021 tercatat 914 kasus turun menjadi 901 kasus pada hari

berikutnya dan turun lagi menjadi 820 kasus pada 16 Agustus.

Pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021, angka kasus aktif yang meliputi pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan maupun isolasi mandiri berkurang lagi menjadi 712 kasus. Menurut Alamsyah, angka kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi menurun lagi menjadi 653 kasus pada 18 Agustus 2021 berkat kepatuhan warga menerapkan protokol kesehatan.

"Dan kemarin kembali turun hingga menyisakan 604 kasus aktif. Sementara hari ini masih dilakukan rekapitulasi. Semoga terus bertahan (tren penurunan kasus) ini," katanya.

Alamsyah mengatakan, menurut data terkini pemerintah jumlah pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 129 orang dan pasien yang menjalani karantina di fasilitas isolasi mandiri terpusat sebanyak 475 orang. Ia menjelaskan bahwa kasus aktif Covid-19 yang tersisa tersebar di 21 dari total 23 kecamatan yang ada Kabupaten Bekasi. Dua kecamatan di Kabupaten Bekasi, Muaragembong dan Cabangbungin, sudah nihil kasus aktif Covid-19.

"Saat ini tidak ada lagi kecamatan yang memiliki kasus aktif di atas 100 orang, bahkan di 17 kecamatan kasus aktifnya sudah di bawah 50," kata Alamsyah. ● pp

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



SHALAT JUMAT PERTAMA ISTIQLAL SAAT PPKM

Umat Islam menunaikan shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/8). Pengurus Masjid Istiqlal kembali membuka pelaksanaan ibadah shalat Jumat setelah ditutup selama masa PPKM Darurat hingga masa perpanjangan saat ini dengan ketentuan jumlah jamaah dibatasi sebanyak 25 persen dari kapasitas masjid dan jamaah wajib menunjukkan kartu vaksin.

Wagub Riza: Formula E Bisa Memberi Dampak Besar bagi Indonesia

Penyelenggaraan ajang lomba tingkat internasional, termasuk Formula E dapat menjadi salah satu kesempatan bagi para atlet untuk memperoleh prestasi. Juga bisa memberikan dampak yang besar untuk Indonesia, khususnya DKI Jakarta, karena selain menjadi kebanggaan dan keuntungan ekonomi, kegiatan itu pun sebagai upaya dalam mengkampanyekan penggunaan mobil listrik.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang sudah sesuai jadwal yang ditentukan. Riza menyebut, pelaksanaan kegiatan itu pun bakal menyesuaikan dengan kondisi pandemi Co-

vid-19, seperti ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang baru saja digelar.

"Semua event-event internasional di dunia kan tetap dijadwalkan sejauh dimungkinkan pelaksanaannya, seperti kemarin Olimpiade di Tokyo," kata Riza.

Menurut Riza, meski pan-

dami Covid-19 masih terjadi, lantasi tidak secara otomatis membatalkan seluruh perlombaan tingkat internasional. Namun, ia menilai, justru teknis pelaksanaannya yang diubah, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Sekarang kan polanya berubah, tidak lagi menghadirkan penonton sebanyak-banyaknya, tapi event-nya kan tetap (dilaksanakan)," ujarnya.

Ia menuturkan, penyelenggaraan ajang lomba tingkat internasional, termasuk Formula E dapat menjadi salah satu kesempatan bagi para atlet untuk memperoleh prestasi. "Jangan karena pandemi Covid kemudian mereka tidak mendapat kesempatan untuk mengukir prestasi," tutur dia.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan, pelaksanaan Formula E juga bisa memberikan dampak yang besar untuk Indonesia, khususnya DKI

Jakarta. Sebab, ia menilai, selain menjadi kebanggaan dan keuntungan ekonomi, kegiatan itu pun sebagai upaya dalam mengkampanyekan penggunaan mobil listrik.

"Kan semua eranya sudah tenaga listrik. Kita harus mendukung dong sebagai kota yang maju, bangsa yang berkembang maju, kita juga harus siap menggunakan tenaga listrik," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Dalam Ingub itu, penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E pada Juni 2022 menjadi salah satu isu prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini pun menimbulkan polemik di kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPRD

DKI diketahui akan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan atas rencana Pemprov DKI untuk menyelenggarakan Formula E.

Untuk diketahui, hak interpelasi adalah hak bertanya bagi anggota DPRD DKI untuk meminta keterangan gubernur. Hak interpelasi bisa diajukan dalam rapat paripurna jika diusulkan oleh dua fraksi dan minimal 15 anggota dewan.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu pihak yang bakal mengajukan hak interpelasi tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menilai, kegiatan itu justru sebagai bentuk menghamburkan uang rakyat di tengah upaya penanggulangan pandemi Covid-19. ● yan

Pj. Bupati Bekasi Berikan Arahan Terkait Pengisian Jabatan Struktural

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kiri) saat memimpin Rapat Kepala Daerah terkait pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintahannya di Aula KH. Noer Ali, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Kamis (19/8).

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, memimpin langsung Rapat Kerja Kepala Daerah, terkait pengisian jabatan struktural di Lingku-

ngan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Aula KH. Noer Ali, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (19/8).

Dalam arahnya, Pj. Bu-

pati Bekasi menyampaikan target pengisian 64 pejabat struktural yang kosong, yang direncanakan akan terisi pada bulan September mendatang. Proses pengisian jabatan ini,

sebutnya, berdasarkan penyesuaian terhadap kompetensi dan internal organisasi.

Selain pengisian jabatan yang kosong, juga akan dilakukan mutasi dan rotasi jabatan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

"Kita akan memulai proses untuk evaluasi, diikuti dengan pengisian jabatan struktural, target September tahun ini. Dimulai dari Eselon IIb, eselon III, maupun eselon IV. Prosesnya akan bertahap karena ada penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan pada kompetensi dan internal organisasi," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Jum'at (20/8).

Tidak hanya berbicara mengenai kompetensi, Pj. Bupati Bekasi juga menilai track record para calon pejabat struktural, yang bertujuan untuk melihat integritas dan komitmen melalui self assessment atau pengamatan, serta wawancara.

"Tentu selain aspek kompetensi, track record juga akan dinilai dan menjadi pertimbangan, karena untuk menjadi pejabat struktural tidak hanya kompetensi, tetapi juga integritas, komitmen. Dan itu bisa diukur lewat self assessment atau pengamatan dan wawancara," katanya.

Dirinya menambahkan, akan membuka kesempatan bagi pegawai Pemkab Bekasi, yang merasa mampu dan memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan jabatan, agar dapat menyampaikan self assessment dan self promotion.

Dani juga menginginkan pembentukan suatu tim yang kompeten, integritas karena tidak seorangpun di pemerintah daerah ini bisa menjalankannya secara sempurna.

Pj. Bupati Bekasi akan melaksanakan pemilihan pejabat struktural ini secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan tidak transaksional. ● mdl

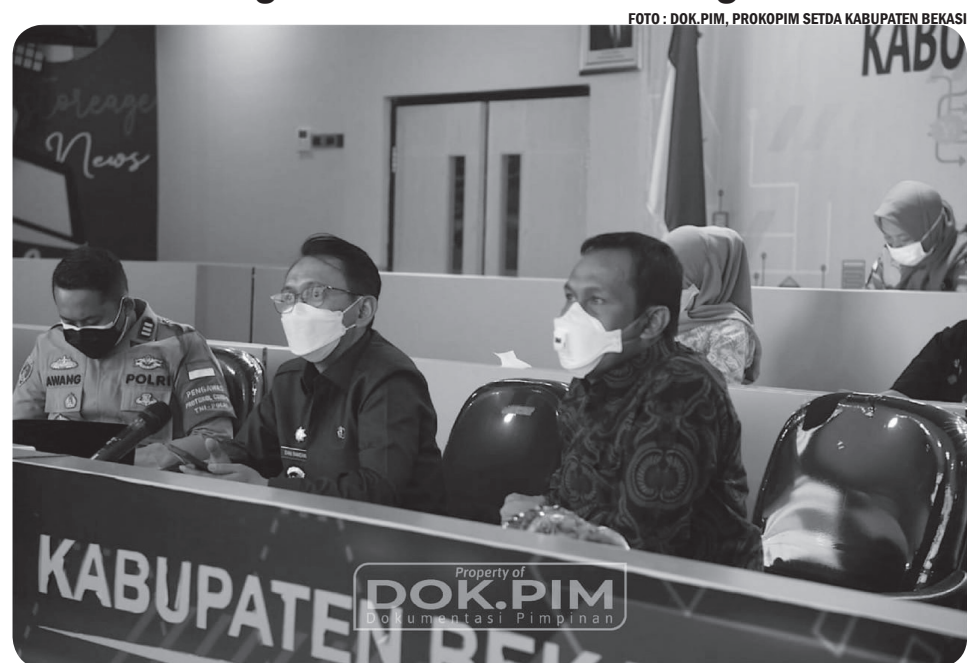
Pemkab Bekasi Ikuti Rakor Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19 Secara Virtual

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19 secara virtual di Command Center, Gedung Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Kamis (19/8).

Rakor yang mengangkat tema Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19 ini, dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy, dan diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet RI, serta seluruh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia. Sementara Pj. Bupati Bekasi didampingi oleh Kapolres Metro Bekasi Hendra Gunawan serta Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya.

Dalam pembahasan mengenai upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Pj. Bupati Bekasi mengatakan bahwa langkah yang saat ini sedang dilakukan yakni memperkuat penerapan protokol kesehatan dengan menggen-



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah), Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi (kanan) beserta jajaran dan Kapolres Metro Bekasi, Hendra Gunawan (kiri) saat mengikuti Rakor Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19 secara virtual di Command Center, Gedung Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Kamis (19/8).

menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Ia menyatakan, pihaknya telah melakukan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan

dan memperhatikan lebih jauh mengenai 3T, untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

"Saya sudah instruksikan semua camat dibantu dengan

LO dan kepala dinas untuk mendorong laju tracingnya serta treatment akan lebih ditingkatkan, agar angka kesembuhan Covid-19 naik," ujarnya dalam rilis Prokopim Setda Kabupaten

Bekasi, Jum'at (20/8).

Sementara itu, dalam sambutannya Menko PMK menyampaikan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan kembali gerakan solidaritas dan kederewanan penanganan Covid-19 beserta dampaknya.

"Rakor ini juga untuk memperkuat dan mengevaluasi penanganan Covid, mulai dari pusat sampai di tingkat paling bawah, percepatan penyaluran bansos di daerah, memonitoring pelaksanaan vaksinasi, serta memberikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah bekerja dalam penanganan Covid-19 ini," tuturnya.

Dalam arahnya, Menko PMK mengatakan terdapat empat poin dari gerakan solidaritas nasional penanganan Covid-19, salah satunya dengan percepatan penyaluran program perlindungan sosial untuk masyarakat, yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Bantuan untuk usaha mikro kecil, Subsidi Listrik, Kartu Sembako, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, dan Bantuan Beras Bulog. ● mdl

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UPT"), bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham dalam PT TIRTA PERMAI BAHARI ("Perseroan") oleh Pihak lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT TIRTA PERMAI BAHARI
Gedung Permata Kuningan Lantai 16
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - Indonesia
Jakarta, 21 Agustus 2021
Direksi
PT TIRTA PERMAI BAHARI